

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat pluralitas tinggi. Perbedaan berbagai aspek berupa agama, budaya, suku, ras, golongan, dan berbagai bentuk keanekaragaman yang lainnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Adanya sebuah perbedaan merupakan modal besar untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kekayaan kehidupan. Setiap kelompok mampu saling memperkaya dan memberikan perspektif kehidupan yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas kehidupan bersama (Naim, 2016: 424). Harapan kehidupan seperti ini terwujud apabila pluralitas dikelola dengan baik. Mengelola pluralitas dalam realitasnya tidak selalu mudah. Banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, seperti perilaku rasisme dan intoleransi. Kegagalan dalam mengelola pluralitas bisa menjadi titik mundur karena banyak pertentangan yang terjadi. Bahkan pertentangan tersebut berakhir dengan konflik yang berkepanjangan.

Semakin rendahnya perilaku toleran di kalangan masyarakat terlihat melalui beberapa survei yang menunjukkan terjadinya perilaku intoleran. Bersumber dari [rappler.com/indonesia](https://www.rappler.com/indonesia), tanda-tanda intoleransi ditandai dengan empat aspek antara lain demonisasi dan kebencian, diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan. Demonisasi dan kebencian muncul ketika pemerintah daerah bekerja sama dengan kelompok radikal

untuk menekan kelompok tertentu, diskriminasi ketika satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak diperlakukan secara adil, kriminalisasi ketika upaya hukum dilakukan untuk menciptakan hierarki status keagamaan, dan terakhir kekerasan yang bersifat sektarian dan komunal.

Data berdasarkan *Wahid Foundation dan Lembaga Survei Nasional* mengenai potensi intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di kalangan muslim Indonesia pada Agustus 2016 menunjukkan skor intoleransi umum terhadap kelompok lain sebesar 49,0%. Pada penelitian ini sikap intoleransi dilihat melalui sikap dan tindakan menghalangi atau melawan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan kelompok yang tidak disukai (walaupun seagama). Data terbaru dari tim riset eLSA Semarang menyebutkan pada tahun 2018 ini masih banyak perilaku intoleran diantaranya: pertama, konflik horizontal atas nama agama yang berupa a) penolakan pemakaman penganut Sapta Darma, b) perusakan 2 gereja, sekolah Kristen, dan NU center, c) penolakan Peace Train, d) penolakan ustad Abdul Shomad di Semarang dan Jepara, e) konflik MTA dan warga di Kebumen, f) penolakan MTA Wonosobo, g) penolakan ritual sedekah laut oleh FUI Cilacap, dan h) penolakan peringatan Asyuro di Semarang. Kedua, kasus keagamaan dalam kategori state-sponsored yang berupa a) surat perintah penghentian jamaan Ahmadiyah Banjarnegara, dan b) penindasan kasus ujaran kebencian warga Semarang dan kabupaten Semarang.

Sikap penting yang seharusnya dikembangkan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural adalah toleransi. Toleransi merupakan basis bagi pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan yang saling menghargai satu sama lain. Toleransi yang telah menjadi tradisi akan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis sekaligus menepis penilaian bahwa Indonesia adalah negara yang rentan konflik terutama antar agama (Purnomo, 2013: 23).

Toleransi dianggap oleh Bannister and Kearns (2013: 2701), memiliki pengaruh dalam interaksi sosial dan juga kebijakan yang ada di masyarakat. Toleransi dibentuk oleh ruang fisik dan politik dimana masyarakat tinggal. Sikap toleransi pada suatu wilayah terjadi dengan pengalaman perbedaan identitas budaya dan agamanya tinggi. Selain itu toleransi juga bisa dipengaruhi oleh ketidaksetaraan dan tingginya tingkat imigrasi suatu wilayah.

Toleransi dalam masyarakat mempengaruhi setiap sikap. Toleransi diwujudkan melalui kesopanan, keramahan, dan rasa menghormati antar sesama manusia. Munculnya kesadaran antar masyarakat diwujudkan dalam toleransi bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan di antara masyarakat sendiri. Moto *agree in disagreement* Casram (2016: 191), menjadi modal sosial yang kuat dalam toleransi antar manusia. Toleransi mampu memetik dukungan bagi terbentuknya masyarakat madani yang diinspirasi oleh nilai-nilai supranatural. Toleransi yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan melahirkan sikap inklusif yaitu sikap membuka diri

terhadap budaya lain. Sikap ini akan mampu menghilangkan sikap tidak mau menerima budaya lain dalam suatu kelompok. Dimana sikap tersebut mengakibatkan pemahaman fanatik dan radikalisme yang abadi di dalam suatu kelompok. Manfaat lebih jauh adalah toleransi mampu memunculkan kemampuan untuk berempati dan membangun kesadaran kemanusiaan dalam cakupan yang luas. Tumbuhnya toleransi bisa membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan (Wahid, 2006).

Pengupayaan ketercapaian toleransi di masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Deklarasi Prinsip Toleransi UNESCO membagi pondasi melawan intoleransi melalui lima aspek, yaitu melalui hukum, pendidikan, kesadaran individu, informasi, dan solusi bersama. Melalui hukum, harus ada kepastian hukum dan penegakan terhadap HAM. Melalui pendidikan diupayakan dengan membiasakan masyarakat dengan perbedaan dan keberagaman. Kesadaran individu dilakukan melalui introspeksi diri dari sikap etnosentrisme, bigot dan rasisme. Informasi haruslah memberikan keterbukaan informasi publik secara merata, dan terakhir adalah adanya solusi bersama dengan melibatkan seluruh pihak untuk mengakhiri intoleransi.

Berdasarkan kelima pondasi tadi, pendidikan menjadi hal esensial dalam penanaman toleransi. Pendidikan menjadi tempat perkembangan para generasi muda yang sedang membentuk pola berpikir dan jati dirinya. Sari (2014: 16) menjelaskan untuk membangun toleransi perlu dilakukan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan digunakan sebagai media untuk

membantu toleransi karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral dan lain sebagainya, (UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Raihani (2011: 23) menjelaskan bahwa pendidikan juga dipandang sebagai cara yang paling efektif, dalam jangka panjang, untuk memungkinkan toleransi berkembang di antara orang-orang dalam masyarakat yang beragam. Sekolah sebagai institusi pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi. Di sinilah anak-anak belajar dan menginternalisasi nilai-nilai yang penting bagi kehidupan mereka. Pemerintah, pendidik, dan peneliti telah melakukan beberapa upaya yang luar biasa untuk memastikan bahwa sekolah adalah tempat pendidikan toleransi yang efektif.

Melihat apa yang terjadi di dunia pendidikan terkait dengan perilaku intoleran, PPIM UIN Jakarta menjelaskan bahwa intoleransi dan radikalisme masih terjadi di kalangan siswa dan guru. Intoleransi dan radikalisme siswa mencapai di atas 50% dari data yang, sedangkan guru beropini dan beraksi intoleran pada kisaran 50% dari data yang ada. Hal tersebut menunjukkan perilaku intoleran masih belum teratasi dengan baik

melalui pendidikan. Tingginya perilaku intoleran yang terjadi karena masih banyak sekolah yang dituntut untuk mengembangkan kecerdasan siswa. Muncul wacana pengembangan prestasi siswa. Wacana ini maksudnya adalah sebagai wacana dominan yang lebih menekankan pada proses restrukturasi (meliputi deregulasi, desentralisasi, perubahan kurikulum, dan pelatihan, Suyata (dalam Efaningrum, 2013: 20). Pernyataan di atas menekankan perbaikan hanya pada proses restrukturisasi, tidak lagi memadai, mengingat adanya keyakinan bahwa sistem sosial dan sistem budaya menjadi medan dan kunci keberhasilan pendidikan. Maka dari itu, keberhasilan pendidikan seringkali terletak pada faktor-faktor yang tidak dapat dilihat secara langsung. Faktor tersebut antara lain nilai-nilai budaya dan keyakinan. Namun, faktor kultur tersebut sering terabaikan dalam upaya perbaikan pendidikan, (Efaningrum, 2013: 20).

Dunia pendidikan membentuk sikap toleransi melalui pembiasaan. Pembiasaan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui pembudayaan. Pembudayaan sikap terhadap warga sekolah terutama siswa dapat dilihat melalui kultur sekolah. Pengembangan kultur sekolah positif di suatu sekolah menjadi faktor utama dalam pembentukan sikap toleran siswa. Kultur positif memberikan peluang sekolah dan warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, efektif, energik, penuh vitalitas dan memiliki semangat tinggi untuk terus berkembang.

Peterson (2002: 10) menjelaskan bahwa kultur sekolah merupakan himpunan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan, ritual dan upacara, simbol dan cerita yang membentuk persona sekolah. Dalam kultur sekolah terdapat adanya harapan untuk membangun dari waktu ke waktu sebagai guru, administrator, orang tua, dan siswa untuk bekerja sama memecahkan masalah, menghadapi tantangan dan mengatasi kegagalan. Schein (dalam Peterson, 2002: 14) menambahkan bahwa budaya sekolah adalah jaringan tradisi dan ritual yang kompleks dan dibangun dari waktu ke waktu. Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan administrator bekerja sama dalam menangani krisis dan prestasi. Pola budaya berlangsung secara terus menerus. Budaya sekolah juga memiliki dampak yang kuat pada kinerja dan membentuk bagaimana orang berpikir, bertindak dan merasa.

Deal & Peterson (2011: x) mengungkapkan pentingnya kultur yang terdapat dalam *“Shaping School Culture”* yaitu *“While policymakers and reformers are pressing for new structures and more rational assessments, it is important to remember that these changes cannot be successful without cultural support. School achievement and student learning”*. Makna dari pendapat Deal Peterson adalah kultur sekolah dan pimpinan sekolah memiliki peran simbolik dalam membentuk pola kultural dalam praktik kehidupan di sekolah. Ketika para pengambil kebijakan dan reformis pendidikan menekankan pada struktur dan asesmen rasional. Hal ini tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan faktor kultural. Kultur sekolah dianggap menjadi faktor kunci yang menentukan

pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik dan keterlaksanaan proses pembelajaran bagi siswa. Adapun Peterson (2002: 10) menyebutkan bahwa budaya sekolah memiliki pengaruh terhadap cara orang berfikir, merasa dan bertindak. Mampu memahami dan membentuk budaya adalah kunci keberhasilan sekolah dalam mempromosikan staaf dan belajar siswa. Selain para ahli di atas dikemukakan Efianingrum (2013: 21) bahwa kultur sekolah memiliki peran simbolik dalam membentuk pola kultural dalam praktik kehidupan di sekolah. Kultur sekolah merupakan faktor kunci yang menentukan pencapaian prestasi akademik dan non akademik serta keterlaksanaan proses pembelajaran bagi siswa.

Berdasarkan penjelasan mengenai toleransi dan kultur sekolah di atas, maka disimpulkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara kultur sekolah dan nilai toleransi. Penguatan nilai toleransi di sekolah dapat dilihat salah satunya melalui visi sekolah. Mengutip pendapat Kouzes dan Posner (dalam Locke, et.al, 1991) yaitu *“Vision as an ideal and unique image of the future”*. Maksudnya adalah visi merupakan gambaran ideal dan unik dari masa yang akan datang Hickman & Silva mendukung dengan mendeskripsikan visi sebagai *“A mental jouney from the known to the unknown, creating the future from a montage of current facts, hopes, dreams, danger, and opprtomities”*. Berdasarkan penjelasan di atas, visi adalah kondisi ideal yang cita-citakan bersama (Evianingrum, 2013: 24).

Visi merupakan hal wajib yang dimiliki oleh setiap sekolah. Melalui visi, sekolah mencoba membentuk bagaimana perilaku dan karakter warga sekolah. Seperti sekolah yang memiliki visi sekolah berbasis lingkungan atau sekolah yang memiliki visi untuk meningkatkan prestasi siswa. Penguatan sikap toleransi juga dapat dilihat melalui visi yang diupayakan melalui pelaksanaan misi sekolah. Salah satu sekolah yang memiliki misi untuk menguatkan sikap toleransi adalah SMA Negeri 8 Yogyakarta. SMA yang memiliki visi “Dengan semangat kerja keras dan dedikasi tinggi SMA Negeri 8 Yogyakarta bertekad untuk mempersiapkan dan mengantarkan anak didik mencapai cita-cita luhur, memiliki misi salah satunya adalah menciptakan budaya damai dan anti kekerasan. Pelaksanaan misi tersebut salah satunya dapat dilihat dalam gambaran kultur sekolah di SMA tersebut. Maka dari itu, peneliti mencoba untuk melihat gambaran kultur sekolah di SMA Negeri 8 untuk melihat bagaimana misi menciptakan budaya damai dan anti kekerasan. Dimana misi ini adalah tujuan dari perilaku toleransi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kultur sekolah dalam penguatan toleransi, diantaranya sebagai berikut.

1. Kegagalan pengelolaan pluralitas mengakibatkan adanya pertentangan.
2. Intoleran menjadi penyebab konflik di Indonesia.

3. Sikap toleransi mengalami penurunan di Indonesia
4. Rendahnya sikap toleran mengakibatkan tingginya penyimpangan sosial.
5. Sebagian besar sekolah cenderung mengembangkan kemampuan kognitif dari pada kemampuan psikomotorik dan afektif.
6. Belum banyak sekolah yang memiliki misi untuk menguatkan nilai toleransi.
7. Proses pembudayaan nilai-nilai toleransi akan tercermin dalam kultur sekolah, namun hal tersebut kurang menjadi perhatian dari para guru dan kepala sekolah.
8. Kepala sekolah dan guru kurang optimal memanfaatkan kultur sekolah untuk mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 8 Yogyakarta?
2. Bagaimana SMA Negeri 8 Yogyakarta membangun strategi pembentukan nilai toleransi melalui kultur sekolah SMA N 8 Yogyakarta?
3. Bagaimana kultur sekolah menguatkan nilai toleransi di SMA N 8 Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui karakteristik kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 8 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui strategi pembentukan nilai toleransi melalui kultur sekolah di SMA N 8 Yogyakarta
3. Untuk mengetahui karakteristik kultur sekolah SMA Negeri 8 Yogyakarta menguatkan nilai toleransi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat positif bagi berbagai kalangan demi kemajuan ilmu pendidikan. Adapun manfaat yang dimaksud adalah manfaat secara teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pendidikan khususnya yang berkaitan dengan kultur sekolah.
 - b. Menambah sumber pengetahuan mengenai toleransi
 - c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian yang akan datang
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penggunaan kultur sekolah dalam menguatkan nilai toleransi.
 - b. Penelitian ini mampu menjadi sumbangan bagi sekolah untuk mengembangkan kultur sekolah yang mampu menguatkan nilai toleransi.

- c. Penelitian ini mampu meningkatkan toleransi warga sekolah secara khusus sehingga menekan pertentangan akibat adanya perbedaan.